



## Jurnal Kalacakra

Volume 01, Nomor 01, 2020, pp: 29-35

P-ISSN 2723-7389 | E-ISSN 2723-7397

e-mail: [jurnalkalacakra@untidar.ac.id](mailto:jurnalkalacakra@untidar.ac.id), website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

### PENGUATAN SIKAP BELA NEGARA SISWA DALAM MENANGKAL RADIKALISME

Suwandoko<sup>1a)</sup>, Yasnanto<sup>2b)</sup>, Delfiyan Widiyanto<sup>3c)</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Politik dan Ilmu sosial, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, 56116, (0293) 364113

<sup>2,3</sup>Prodi PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, 56116, (0293) 364113

e-mail: <sup>a)</sup>[suwandoko@untidar.ac.id](mailto:suwandoko@untidar.ac.id), <sup>b)</sup>[yasnanto@gmail.com](mailto:yasnanto@gmail.com), <sup>c)</sup>[delfiyanwidiyanto@untidar.ac.id](mailto:delfiyanwidiyanto@untidar.ac.id)

Received: 25 Juni 2020

Revised: 28 Juni 2020

Accepted: 28 Juni 2020

#### ABSTRAK

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Upaya penguatan sikap bela negara dapat dilakukan di sekolah yang merupakan wahana pendidikan bagi generasi muda bangsa untuk membentuk sikap bela negara dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menangkal adanya paham radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi sikap bela Negara dan menganalisis penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi sikap bela negara yang ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme yang didalamnya terbentuk hubungan sinergi antara kepala sekolah dengan guru dan pembina pramuka melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pramuka. Sehingga mampu siswa mampu menerapkan nilai-nilai luhur pada Pancasila yang mampu menangkal adanya paham radikalisme.

**Kata Kunci:** penguatan sikap, bela negara, radikalisme.

#### ABSTRACT

*Defending the country is the right and duty of every citizen. Efforts to strengthen the attitude of defending the country can be done in schools which are a vehicle for education for the nation's young generation to shape the attitude of defending the country by instilling the values of Pancasila in counteracting the understanding of radicalism. The purpose of this study is to dismantle the urgency of state defense attitudes and analyze the strengthening of students' state defenses in counteracting radicalism. This research method uses the type of sociological juridical research. The results showed that the urgency of the state defense attitude in terms of aspects philosophical, sociological and juridical. Strengthening the stance of defending the country's students in counteracting radicalism in which a synergy relationship is formed between the principal and the teacher and the scoutmaster through civic education and scout education. So that students are able to apply the noble values of Pancasila which are able to ward off the understanding of radicalism.*

**Keywords:** strengthening attitudes, defending the country, radicalism.

## PENDAHULUAN

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sebagaimana berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal ini setiap warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab serta mengabdikan secara ikhlas dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedisiplinan, keuletan, ketangguhan, kejujuran serta rasa tanggung jawab harus tertanam dalam kepribadian setiap warga negara dalam mewujudkan bela negara. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara.

Upaya penguatan sikap bela negara dapat dilakukan di sekolah. Sekolah menjadi wahana pendidikan bagi generasi muda bangsa. Penguatan sikap bela negara dapat digunakan untuk mengatasi ancaman globalisasi dan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ancaman bagi generasi muda saat ini ialah dengan berkembangnya paham radikalisme. Penyebaran paham ekstrim dan radikal di kalangan pelajar yang akan menjadi target kelompok tertentu untuk dibina menjadi generasi radikal.

Idris (2016: 202) menyatakan bahwa radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme yang berbahaya berupa perubahan besar atau ekstrem namun cenderung bertentangan dengan kelaziman dan aturan agama atau negara.

Penyebab adanya gerakan radikalisme dikarenakan keterbelakangan pendidikan,

perubahan politik, kemiskinan, rendahnya peradaban budaya, dan sosial. Adanya radikalisme yang berujung pada kegiatan terorisme yang mengakibatkan kerugian terhadap negara maupun warga negara. (Abdullah, 2006: 2-3).

Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan program yang menyeluruh dan bisa menangkal ancaman akan bahaya radikalisme. Bela negara menjadi salah satu upaya dikalangan pelajar untuk menangkal adanya paham radikalisme. Sehingga perlu segera diantisipasi, agar dimasa depan tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan bela negara disesuaikan dengan perkembangan tumbuh kembang anak. Para pelajar SMP perlu mulai diperkenalkan tentang bela negara. Dengan penanaman nilai-nilai sikap bela negara dilakukan sejak dini. Diharapkan, nilai-nilai tersebut akan berbuah menjadi perilaku sehari-hari yang mencerminkan cinta tanah air.

Bela negara akan mewujudkan anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai marabahaya. Ancaman ideologi dan cara pandang, akan tereduksi dengan sendirinya, karena ada filter yang dipupuk sejak anak-anak melalui program bela negara. Selain itu, bela negara sejatinya menjadi implementasi lima pilar perlindungan anak, di antaranya adalah pemerintah dan negara. Diharapkan, dengan kaderisasi Bela Negara di kalangan anak, maka akan tumbuh kesadaran untuk membentengi diri dari berbagai ancaman nonmiliter seperti yang sudah disebut di atas. Hal ini tidak lepas dari keinginan kita semua untuk menjaga bersama-sama keutuhan NKRI di masa depan dengan mendidik lebih baik lagi anak-anak kita.

Melalui bela negara diharapkan akan terbangun generasi yang memiliki karakter disiplin, optimisme, kerja sama, dan kepemimpinan yang sudah barang tentu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Penanaman nilai cinta tanah air sejak dini, artinya kita membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan di generasi muda. Ini menjadi upaya konkret untuk

menentukan sikap dalam konteks mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI. Dengan demikian, maka peneliti ingin mengetahui penguatan sikap bela negara dalam menangkal radikalisme di SMP Kartika XII-1.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ashofa (2013: 20-21) bahwa pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan pola-pola yang berlaku. Pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola-pola penguatan sikap bela negara dalam menangkal radikalisme di SMP Kartika XII-1. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis. Menurut Soekanto (2012: 51) penelitian hukum yuridis sosiologis berupa penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Secara yuridis terkait peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-Undang 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-Undang 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Secara sosiologis penelitian ini difokuskan terhadap pelaksanaan hukum yang membahas penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme.

Penelitian ini dilakukan di SMP Kartika XII-1 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan

triangulasi data. Teknik analisis data model interaksi ialah komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Sikap Bela Negara Siswa**

Bela negara memiliki pengertian sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara secara utuh (Siahaan, 2016: 9).

Berdasarkan hal tersebut, maka urgensi sikap bela negara siswa di SMP Kartika XII-1 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dilihat dari beberapa landasan yaitu:

#### **1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis terkait dengan sikap bela negara bagi siswa yakni Pancasila yang merupakan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa Pancasila menjadi ideologi Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehingga siswa harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bela negara.

#### **2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis terkait dengan sikap bela negara bagi siswa yakni:

##### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan hal tersebut siswa berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang terimplementasikan dalam kehidupan sekolah maupun kehidupan di masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pasal 9 ayat (1) berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

- 1) Pendidikan kewarganegaraan.
- 2) Pelatihan dasar kemiliter secara wajib.
- 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib.
- 4) Pengabdian secara profesi

Berdasarkan hal tersebut siswa ikut serta dalam upaya bela negara terwujud dalam bentuk mengikuti proses pembelajaran yakni pada pendidikan kewarganegaraan.

c. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 100 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut siswa ikut berpartisipasi untuk menghormati hak asasi manusia sebagai wujud sikap bela negara tanpa adanya diskriminasi sehingga mampu terwujud perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

3. Landasan Sosiologis

Nalurita Puspitawati, S.Pd. selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Magelang. 16 Desember 2019), menyatakan bahwa

alasan sikap bela negara penting bagi siswa di SMP Kartika, yakni:

- a. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Meningkatkan rasa cinta tanah air.
- c. Membentuk kedisiplinan dalam bersikap terkait waktu dan aktivitas.
- d. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.
- e. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga mampu mencegah radikalisme.

### **Penguatan Sikap Bela Negara Siswa**

Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga kedaulatan, dan keutuhan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia (Siahaan, 2016: 10).

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penguatan sikap bela negara siswa menangkal radikalisme di SMP Kartika XII-1. Bentuk penguatan sikap bela negara oleh siswa yaitu:

1. Sikap bela negara bagi siswa melalui pendidikan kewarganegaraan

Nalurita Puspitawati, S.Pd. selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Magelang. 16 Desember 2019), menyatakan bahwa penguatan sikap bela negara bagi siswa diajarkan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan membentuk karakter siswa akan pentingnya sikap bela negara. Selain itu, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diperkenalkan multikultural. Pendidikan multikultural dapat menjadi upaya menangkal radikalisme. Hal itu sesuai yang diungkapkan oleh Munip (2012: 174-179) upaya yang digunakan untuk menanggulangi radikalisme di sekolah salah satunya dengan pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural.

Siswa SMP Kartika (Magelang. 19 Desember 2019), menyatakan bahwa dengan pendidikan kewarganegaraan

kami diajarkan akan pentingnya sikap bela negara untuk membentuk sikap kedisiplinan, mengamalkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kedisiplinan dan mengamalkan nilai Pancasila bagian dari dasar bela negara. Menurut Siahaan (2016:10) bahwa lima dasar bela negara yakni,

- a. Cinta tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Yakin akan Pancasila Sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa.
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Percaya pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menangkal paham aliran ekstrem mengenai paham yang merusak kesatuan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut pendidikan kewarganegaraan yang merupakan salah satu bentuk bela negara didalamnya memberikan materi akan wawasan kebangsaan yang berkepribadian Pancasila. Maka mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam mewujudkan bela negara. Selain hal tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai wujud pembelajaran dalam menuntut ilmu demi meningkatkan kualitas diri, memperkuat toleransi adanya perbedaan yang ada di dalam masyarakat, serta untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa dalam hal ini adalah mencegah adanya paham radikalisme yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

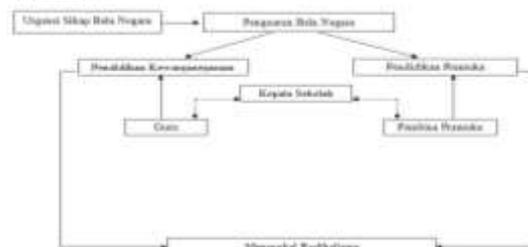
2. Sikap bela negara bagi siswa melalui pendidikan pramuka

Adi Nurcahyono, S.Pd. selaku Ka Gudop Pramuka (Magelang. 17 Desember 2019), pramuka yang memiliki tujuan mulia, di antaranya menanamkan rasa cinta tanah air dan pengamalan Pancasila kepada generasi muda sebagai wujud bentuk bela negara.

Siswa SMP Kartika (Magelang. 19 Desember 2019), menyatakan dengan adanya pendidikan pramuka dapat membentuk pribadi yang disiplin, tangguh, mandiri dan cinta tanah air. Persamaan cinta tanah air yang dimiliki oleh siswa dapat menjauhkan dari masuknya paham aliran yang mengajak pada hal-hal yang merusak kehidupan bangsa dan tetap menjaga keutuhan bangsa. Apabila siswa memiliki pribadi yang disiplin, tangguh, mandiri dan cinta tanah air maka akan menjadi modal persatuan dan kesatuan NKRI.

Berdasarkan hal tersebut dengan pendidikan pramuka, siswa sebagai peserta didik memegang teguh janji Tri Satya dan menepati Dasa Dharma. Sehingga membentuk generasi muda menjadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum dan disiplin. Pendidikan pramuka merupakan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia.

Gerakan pramuka merupakan wadah untuk mendidik siswa agar mempunyai watak, berkepribadian yang luhur berdasarkan Pancasila, serta menanamkan sikap bela negara. maka siswa mampu menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia sebagai kader bangsa yang sanggup menjaga serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Maka bisa menangkal adanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yakni paham radikalisme. Model penguatan sikap bela negara siswa sebagai berikut.



Gambar 1. Penguatan Sikap Bela Negara Siswa

Urgensi sikap bela negara siswa merupakan landasan dalam penguatan sikap bela negara siswa di SMP Kartika XII-1. Penguatan sikap bela negara siswa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pramuka. Hubungan yang sinergi antara kepala sekolah dengan guru serta pembina pramuka berperan penting untuk terlaksananya penguatan sikap bela negara siswa. Sehingga mampu mewujudkan sikap kepada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai luhur pada Pancasila yang mampu menangkal adanya paham radikalisme yang yang dapat mengakibatkan disintegrasi Bangsa Indonesia.

Nalurita Puspitawati, S.Pd. selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Magelang. 16 Desember 2019), menyatakan hambatan dalam penguatan sikap bela negara siswa yakni terkait dengan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. Upaya yang dilakukan yakni melakukan monitoring evaluasi terhadap siswa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Urgensi sikap bela negara siswa di SMP Kartika XII-1 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang terdiri atas landasan filosofis yakni Pancasila, landasan yuridis yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta landasan sosiologis yakni melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan rasa cinta tanah air, membentuk kedisiplinan dalam bersikap terkait waktu dan aktivitas, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ideologi yang

bertentangan dengan Pancasila, sehingga mampu mencegah radikalisme.

2. Penguatan sikap bela negara siswa di SMP Kartika XII-1 dilakukan melalui mata pelajaran PPKn dan ekstrakurikuler pramuka. Kedua kegiatan tersebut menjadi wadah pembelajaran di sekolah untuk siswa. Sehingga mampu siswa mampu menerapkan nilai-nilai luhur pada Pancasila yang mampu menangkal adanya paham radikalisme.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada kepala sekolah, guru PPKn, pembina pramuka SMP Kartika XII-1 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang telah membantu penelitian sebagai narasumber penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perpektif Historis.. *Jurnal ADDIN, Vol. 10 (1). Hlm.1-28.*
- Ashofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta:Rineka Cipta.
- Idris, Irfan. (2016). *Membumikan Deradikalisasi: Soft Aproach Model Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan.* Jakarta: Daulat Press.
- Munip, Abdul. (2012). Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1(2). Hlm. 159-180.*
- Siahaan, Timbul. (2016). Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan. *Wira. Majalah Wira.* Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-Undang 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.